



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT

Jl. Soa Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua Kode Pos 99115

## LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Provinsi Papua telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Provinsi Papua atas target kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2022 kepada seluruh stakeholders sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai sarana informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi potret pertanggungjawaban kinerja juga bermanfaat dalam mengevaluasi serta bahan pengambilan keputusan untuk mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Papua di masa yang akan datang.

Jayapura, 15 Februari 2023

PIK INSPEKTUR PROVINSI PAPUA,



Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFA  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA  
NIP. 19601229 198803 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7 - 22</b>
A. KEDUDUKAN .....	7
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	7
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	8
D. SUMBER DAYA ORGANISASI .....	10
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	17
F. PERMASALAHAN .....	19
G. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH .....	20
H. SISTEMATIKA LAPORAN .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>23 - 27</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	23
B. PERJANJIAN KINERJA .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>28 - 65</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	29
B. REALISASI ANGGARAN .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66 - 68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Papua tahun anggaran 2022 menginformasikan tugas dan fungsi serta tujuan, sasaran maupun hasil capaian kinerja tahun 2022 Inspektorat Provinsi Papua yang merupakan tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan wujud pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Papua atas Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang telah diperjanjikan dengan Gubernur Papua.

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Papua tahun 2019-2023 telah ditetapkan suatu tujuan yaitu "Terwujudnya tatakelola pemerintah yang baik, akuntabel dan bersih di Provinsi Papua". Tujuan tersebut mengacu pada misi ke III RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 yaitu "Penguatan Tatakelola Pemerintahan" untuk mencapai Visi "Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan".

Pada tahun 2022 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yang telah dicapai. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2022, Inspektorat Provinsi Papua telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti anggaran, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Adapun capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 100,95%, yaitu terdiri dari :

**Tabel 1**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
<b>Capaian Indikator Sasaran 1</b>					<b>101,89</b>
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tatakelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi Papua	95 %	100 %	105,26%
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	69%	69,28%	100,41%
		3. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Ditangani	100%	100%	100%
<b>Capaian Indikator Sasaran 2</b>					<b>&gt;100,00</b>
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	4. Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Papua	A	AA	>100,00
<b>Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran 1 + 2</b>					<b>100,95</b>

Dari hasil pengukuran kinerja pada 4 (empat) indikator sasaran utama di atas terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya mencapai 100% dan 3 (tiga) indikator melampaui target, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator pertama dengan nilai capaian 105,26% tercapai karena menurunnya rekomendasi auditor eksternal terhadap pengelolaan APBD Provinsi Papua dimana jumlah rekomendasi bernilai kerugian negara/daerah tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

2. Indikator kedua dengan nilai capaian 100,41% tercapai karena penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan telah melampaui target yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu 69%.
3. Indikator ketiga dengan nilai capaian 100% telah menenuhi target yang telah ditetapkan.
4. Indikator keempat dengan nilai capaian >100% juga telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari 4 (empat) indikator sasaran utama tersebut dapat dihitung rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Provinsi Papua tahun 2022 sebesar **100,95%** dengan predikat "**Sangat Berhasil**".

Capaian tersebut di atas menggambarkan peran Inspektorat Provinsi Papua dalam memberikan kontribusi kepada *stakeholders* sudah sangat memuaskan namun tetap perlu usaha untuk mempertahankan dan memperbaiki menuju capaian yang lebih baik lagi. Selain Indikator Sasaran Utama di atas terdapat juga beberapa kegiatan yang dapat menjadi nilai tambah bagi peran Inspektorat Provinsi Papua yaitu berperan dalam melakukan pemantauan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK, pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, pemantauan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan peningkatan capaian yang signifikan serta penugasan-penugasan non PKPT.

Alokasi anggaran untuk Inspektorat Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD Provinsi Papua adalah sebesar Rp.80.672.371.600,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.79.602.151.600,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.070.220.000,00. Total realisasi anggaran sebesar Rp.62.863.700.856,00 atau 77,92%. Anggaran belanja daerah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Inspektorat, belanja modal, membiayai belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Inspektorat Provinsi Papua.

Dibandingkan tahun 2021, anggaran tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.905.538.734,00 atau sebesar 3,60% (anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 83.577.910.334,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar

Rp.81.426.638.273,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.2.151.272.061,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.61.381.229.358,00 atau 73,44%) dengan capaian kinerja tahun anggaran 2021 sebesar 104,22 persen. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Provinsi Papua tahun anggaran 2022 sebesar 100,95% dengan efisiensi kinerja sebesar 1,45%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan capaian kinerja dengan "Sangat Berhasil".

Jayapura, 15 Februari 2023

PI. INSPEKTUR PROVINSI PAPUA,



Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFA  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA  
NIP. 19601229 198803 1 001